

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam lingkungan bisnis, tak terkecuali dunia perbankan yang semakin kompetitif membutuhkan suatu informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut, diperlukan suatu penilaian atau pengukuran terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Kinerja suatu bank sangat erat hubungannya dengan peran dan fungsi manajemen dari bank tersebut. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen bank, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya.

Kasus yang sempat mencuat yaitu kasus Bank Century pada bulan November 2008 diselamatkan pemerintah. Selain karena kalah kliring, diduga oknum Bank Century dari pihak manajemen dan pemilik yang melakukan pemalsuan dan penggelapan dana nasabah. Dalam kasus tersebut kegiatan *Corporate Governance* dalam Bank Century jelas tidak berjalan baik, terutama dalam *governance process* yang mengakibatkan penyelewengan beberapa oknum yang merugikan pihak bank, terutama merugikan para *Stakeholders* dan *Shareholders*. Kejadian tersebut membuat masyarakat berpikir untuk menginvestasikan uangnya pada bank.

Uraian di atas merupakan fenomena yang saat ini terjadi di dunia industri perbankan. Dengan demikian maju tidaknya kegiatan operasional suatu bank sangat tergantung dengan kemampuan dari manajemen tersebut mengelola banknya masing-masing. Peran manajemen dalam mengelola bank menjadi sangat penting agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Hal ini mendorong pihak Bank Sentral dan Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru untuk menunjang perkembangan perbankan di Indonesia, salah satunya PBI no: 15/15/DPNP yang mengatur tentang *Good Corporate Governance* atau GCG dan Pengelolaan Manajemen Risiko.

Sejak Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dikeluarkan pada tahun 1999, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Walaupun peringkat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam negeri masih sangat rendah, namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia dirasakan ada peningkatan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di dunia perbankan harus mengikuti prinsip dari GCG secara total.

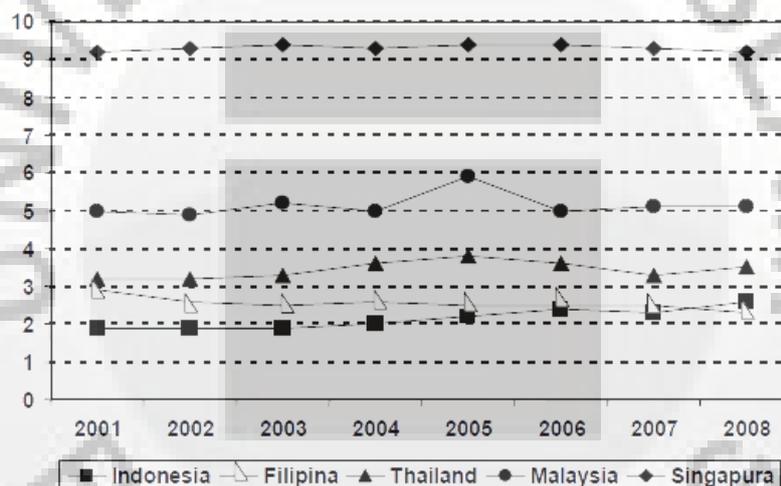
Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) jelas sangat penting untuk saat ini, mengingat sekarang regulasi Bank Indonesia yang terbaru tentang penilaian kesehatan bank pada PBI No. 13/1/PBI/2011 dimana Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum yang digunakan sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank: Berorientasi pada risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan struktur. Dengan adanya

Good Corporate Governance/GCG kedalam tingkat penilaian kesehatan bank membuat elemen ini menjadi hal yang sangat mempengaruhi kinerja bank.

Berdasarkan hasil survey Bank Dunia tahun 2007, dari total 175 negara yang di survei, Indonesia berada pada urutan 135. Dan pada tahun tersebut, peringkat GCG di Indonesia pun berada pada peringkat terendah bila dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Angka CGPI Indonesia diantara Negara-negara ASEAN



Sumber: www.iicg.org, 2010

Good Corporate Governance/GCG merupakan elemen penting dalam operasional bank dalam melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) untuk analisis tingkat kesehatan bank. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran 15/15/DPNP yang disebutkan bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) atas tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko (RBBR), baik

secara individual maupun secara konsolidasi. Dengan peraturan terbaru, *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya lebih ditekankan pada aspek *structure*, sekaligus juga aspek *process* dan *outcome*. *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*, merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam pelaksanaannya. *Governance Process* merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan untuk mewujudkan komitmen dan *structure governance* sehingga dapat dicapai *governance outcome* yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG). Sedangkan *Governance Outcome* digunakan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

Untuk penilaian terhadap *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* memiliki tujuan dan maksud masing-masing dalam penilaiannya. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada bank. Sedangkan untuk penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Sedangkan untuk penilaian terakhir yaitu penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai

kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Hasil penelitian Bank Indonesia menunjukkan 60 persen perbankan masih melanggar *Good Corporate Governance*. Menurut Deputi Gubernur BI, Siti Fadriah pelanggaran yang terjadi terutama pada masalah komisaris independen dalam dewan komisaris. Kasus ini mencapai 53 persen. Selanjutnya pelanggaran dalam pembentukan komite mencapai 30,7 persen, tidak terpenuhinya jumlah komisaris independen sekitar 18 persen. (www.unisosdem.org,2007). Menurut beliau dengan penerapan GCG akan mendukung kinerja yang baik dari perbankan.

Hal tersebut dapat diukur dengan pendekatan manajemen risiko operasional karena dengan manajemen risiko operasional dapat melihat kemungkinan terjadinya risiko pada saat kegiatan operasional *governance* berlangsung. Kegiatan *governance* yang dimaksud adalah *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Risiko operasional mempunyai dimensi yang luas dan kompleks dengan sumber risiko yang merupakan gabungan dari berbagai sumber yang ada dalam organisasi, proses, dan kebijakan, sistem dan teknologi, orang, dan faktor-faktor lainnya (Muslich:2007:25). Risiko Operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Basel II Capital Accord mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul dari

kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau dari kejadian-kejadian eksternal. Seiring meningkatkan keragaman dan kompleksitas produk dan aktivitas perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, perkembangan sistem dan teknologi informasi pendukung yang cepat, serta meningkatnya ekspektasi nasabah dari pelayanan yang diberikan, maka pengelola risiko operasional menjadi suatu elemen yang sangat penting. Manajemen risiko operasional digunakan untuk mengukur potensi kerugian operasional sebagai penilaian pemenuhan kecukupan modal untuk menutup kerugian dan strategi untuk menjaga tingkat kecukupan modal.

Pengukuran potensi kerugian risiko operasional menurut *Basel Comitte* dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode standar dan metode internal. Pengukuran dengan metode standar dapat dilakukan salah satunya melalui metode *Basic Indicator Approach (BIA)*. Sedangkan pengukuran dengan internal model dapat dilakukan melalui pendekatan *Advanced Measurement Approach (AMA)*. Adapun pengukuran kerugian risiko operasional bank dapat dianalisis dengan teknik analisis aspek keuangan. Aspek keuangan menitikberatkan pada analisis ratio.

Isnanta (2007) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, dan komite audit. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba dan kinerja

perusahaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa struktur kepemilikan, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba tetapi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Sari (2010) dalam penelitiannya tentang pengaruh mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja di Perbankan Nasional menyimpulkan bahwa hasil analisis menemukan Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Kedua, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Ketiga, Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal Big 4 menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.

Penelitian tentang pengaruh komite terhadap implementasi GCG juga diteliti oleh Chitan (2010) menyatakan bahwa dengan adanya komite GCG pada bank, maka akan meningkatkan kinerja perbankan. Dengan demikian maka GCG berpengaruh positif terhadap kinerja bank.

Jumlah pelatihan sebagai variabel dari *governance process* dalam jurnal Djajendra (2011) tentang *Enterprise Risk Management* (ERM) mengatakan bahwa pelatihan memberikan motivasi dan pencerahan kepada organ-organ bank agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko bank, guna membangun dan merawat kontrol yang memadai, untuk memperbaiki setiap risiko yang berpotensi membahayakan eksistensi bank.

Sedangkan perubahan jumlah biaya remunerasi sebagai variabel dari *governance process* dalam teori agensi dikatakan bahwa yang mengatakan masalah keagenan juga akan timbul jika pihak manajemen atau agen perusahaan tidak atau kurang memiliki saham biasa perusahaan tersebut. Karena dengan keadaan ini menjadikan pihak manajemen tidak lagi berupaya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan mereka berusaha untuk mengambil keuntungan dari beban yang ditanggung oleh perusahaan.

Jumlah penyimpangan internal sebagai variabel *governance outcome* merupakan hasil dari pelaporan Komite Strategi Anti Fraud yang merupakan dari kebijakan bank sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengidentifikasi lebih dalam tentang risiko operasional dalam pelaksanaan GCG di perbankan dengan melihat dari BOPO sebagai indikator risiko operasional yang terjadi dan diukur dengan 3 aspek *Governance* sebagai katalisator yaitu *Governance Structure* yang diwakilkan oleh jumlah komite audit, komite remunerasi, dan komite pemantau risiko, *governance process* yang diwakilkan oleh jumlah pelatihan dan pemberian remunerasi, dan *governance outcome* yang diwakilkan oleh jumlah penyimpangan internal yang terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Pengaruh *Governance Structure*, *Governance Process*, Dan *Governance Outcome Terhadap Operational Risk*” (Studi Pada Beberapa Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012-2013)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang dan masalah penelitian terdahulu mengenai *Good Corporate Governance*, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *Governance Structure* Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013?
2. Bagaimana perkembangan *Governance Proses* Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013?
3. Bagaimana perkembangan *Governance Outcome* Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013?
4. Bagaimana perkembangan *Operational Risk* (BOPO) Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013?
5. Bagaimana pengaruh *Governance Structure* terhadap *Operational Risk* secara parsial dan simultan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013?
6. Bagaimana pengaruh *Governance Process* terhadap *Operasional Risk* secara parsial dan simultan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013?
7. Bagaimana pengaruh *Governance Outcome* terhadap *Operational Risk* secara parsial dan simultan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013?

8. Bagaimana pengaruh *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* terhadap *Operational Risk* secara simultan dan parsial Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang sudah diidentifikasi, yaitu:

1. Untuk menganalisis perkembangan *Governance Structure* Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.
2. Untuk menganalisis perkembangan *Governance Process* Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.
3. Untuk menganalisis perkembangan *Governance Outcome* Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.
4. Untuk menganalisis perkembangan *Operational Risk* (BOPO) Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Governance Structure* terhadap *Operational Risk* secara parsial dan simultan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.

6. Untuk menganalisis pengaruh *Governance Process* terhadap *Operational Risk* secara parsial dan simultan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.
7. Untuk menganalisis pengaruh *Governance Outcome* terhadap *Operational Risk* secara simultan dan parsial Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.
8. Untuk menganalisis pengaruh *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* terhadap *Operational Risk* secara simultan dan parsial Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang penulis lakukan ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta pola pikir dalam menganalisis tentang pengaruh *Governance Structure*, *Governance Process*, Dan *Governance Outcome* Terhadap *Operational Risk* di beberapa Perbankan yang terdaftar Di BEI periode 2009-2013.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Manajemen Perusahaan dalam mengendalikan dan mengukur tingkat *Operational Risk* yang terjadi ketika pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

3. Bagi Pihak Lain (akademisi)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan terhadap ilmu manajemen keuangan dan perbankan. Selain itu dengan penelitian ini diharapkan bagi para peneliti selanjutnya dapat membantu mengembangkan analisis risiko operasional pada GCG.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Kata “*Governance*” berasal dari kata latin “*gubernance*” yang berarti mengarahkan dan mengendalikan (farrar, 2005: 3). Dalam ilmu manajemen kata tersebut diadaptasikan menjadi *corporate governance* dan diartikan sebagai upacya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi termasuk perusahaan. (Selvi, 2013)

Good Corporate Governance (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Corporate Governance yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. (V.Jingga Tadikapury, 2012)

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tahun 2002, pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pemegang kepentingan.

Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

Berbagai definisi *Good Corporate Governance* (GCG) yang disampaikan diatas, memiliki kesamaan makna yang menekankan pada bagaimana mengatur hubungan antar semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan, dengan kata lain, pada intinya GCG yang disusun oleh *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) terdiri dari lima aspek yaitu :

1. *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevansi mengenai perusahaan.
2. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung-jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility*, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency*, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai definisi *Good Corporate Governance* (GCG) yang disampaikan di atas dapat diketahui ada lima macam tujuan utama *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directorss dengan manajemen senior perusahaan.

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) yang terbaru berdasarkan Surat Edaran 15/15/DPNP nilai berdasarkan pendekatan risiko (*risk approaching*). 3 (tiga) aspek *Governance* yang dinilai dengan pendekatan risiko adalah *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dan Bank Indonesia mewajibkan setiap bank di Indonesia melakukan penilaian sendiri (*SelfAssesment*) dengan pendekatan risiko (*Risk Bank Based Rating*).

Aspek yang perlu diperhatikan dalam *self assesment*:

Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank.

Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penilaian *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Salah satunya dengan melihat jumlah penyimpangan internal Bank tersebut.

Definisi Risiko Operasional menurut Laycock (1998:145) adalah segala risiko yang terkait dengan fluktuasi hasil usaha perusahaan akibat dari hal-hal yang

terkait dengan kegagalan sistem atau pengawasan dan peristiwa yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan.

Dalam dokumen konsultatif yang diterbitkan oleh Basel Committee On Banking Supervision pada bulan Januari 2001 dan tertuang dalam New Basel Capital Accord, risiko operasional didefinisikan sebagai “*The Cost Of Direct On Indirect Loss Resulting From Inadequate or Failed Internal Processes, People, and Systems or from external events*”.

Suatu risiko operasional yang timbul karena adanya sebab (*cause*) yaitu suatu hal utama yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian (*events*). *Cause* berpotensi menghasilkan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Dari *events* risiko operasional yang ada, akan memberikan akibat atau dampak (*impact*) terhadap perusahaan. Akibat umum yang ditimbulkan dapat berupa kerugian kualitatif. Dowd, CA (2003:36) menggambarkan mekanisme terjadinya risiko operasional, yaitu:

1. Penyebab timbulnya risiko operasional (*cause*)

Cause adalah keadaan yang memicu terjadinya suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Menurut Crouhy (2001:479), risiko operasional mempunyai 2 (dua) komponen utama yaitu:

- a. Kegagalan operasional yang disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu:
 - Faktor sumber daya manusia
 - Prosedur/*business process* (urutan kegiatan yang berjalan secara logis dan sesuai standar yang umum)

- Sistem terpasang (jaringan dan infrastruktur lainnya) yang telah dibangun untuk menjalankan bisnis process yang telah diatur.

b. Kegagalan strategi operasional, terjadi terutama disebabkan faktor eksternal yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Persaingan
2. Perubahan kebijakan politik
3. Kejadian *force majeure* misalnya: bencana alam dan lain-lain

Terkait dengan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang bermacam-macam, maka *The London Center for the Study of Financial Innovation* (Marshall, 76:81) telah mengelompokkan 10 besar fakto-faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko operasional yang dikenal dengan sebutan “*the key of banking banana skins*”, sebagai berikut:

1. *Poor management*
2. Gejala nilai tukar (*currency turbulence*)
3. Regue traders
4. Kompetisi yang ketat (*expenssivecompetition*)
5. Prosedur kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian (*badlending*)
6. Pasar derivatif
7. *Fraud*
8. Pasar yang berkembang
9. Produk baru

10. Perkembangan teknologi yang pesat (*technology “snafus”*)

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal (idroes, 2011:23). Untuk mengantisipasi hal ini, bank perlu mengukur seberapa besar risiko operasional yang mungkin akan dihadapi dengan menggunakan rasio keuangan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Menurut Riyadi (2006:159), BOPO adalah rasio biaya operasi dibandingkan pendapatan operasi. Bank memiliki tingkat BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak menjalankan kegiatan operasionalnya dengan efisien sehingga memungkinkan risiko operasional yang dimiliki oleh bank akan semakin besar (Amriani, 2012).

Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Operating ratio} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100$$

Semakin rendah BOPO

berarti semakin efisien kinerja bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Menurut Riyadi (2004:141), besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52% hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

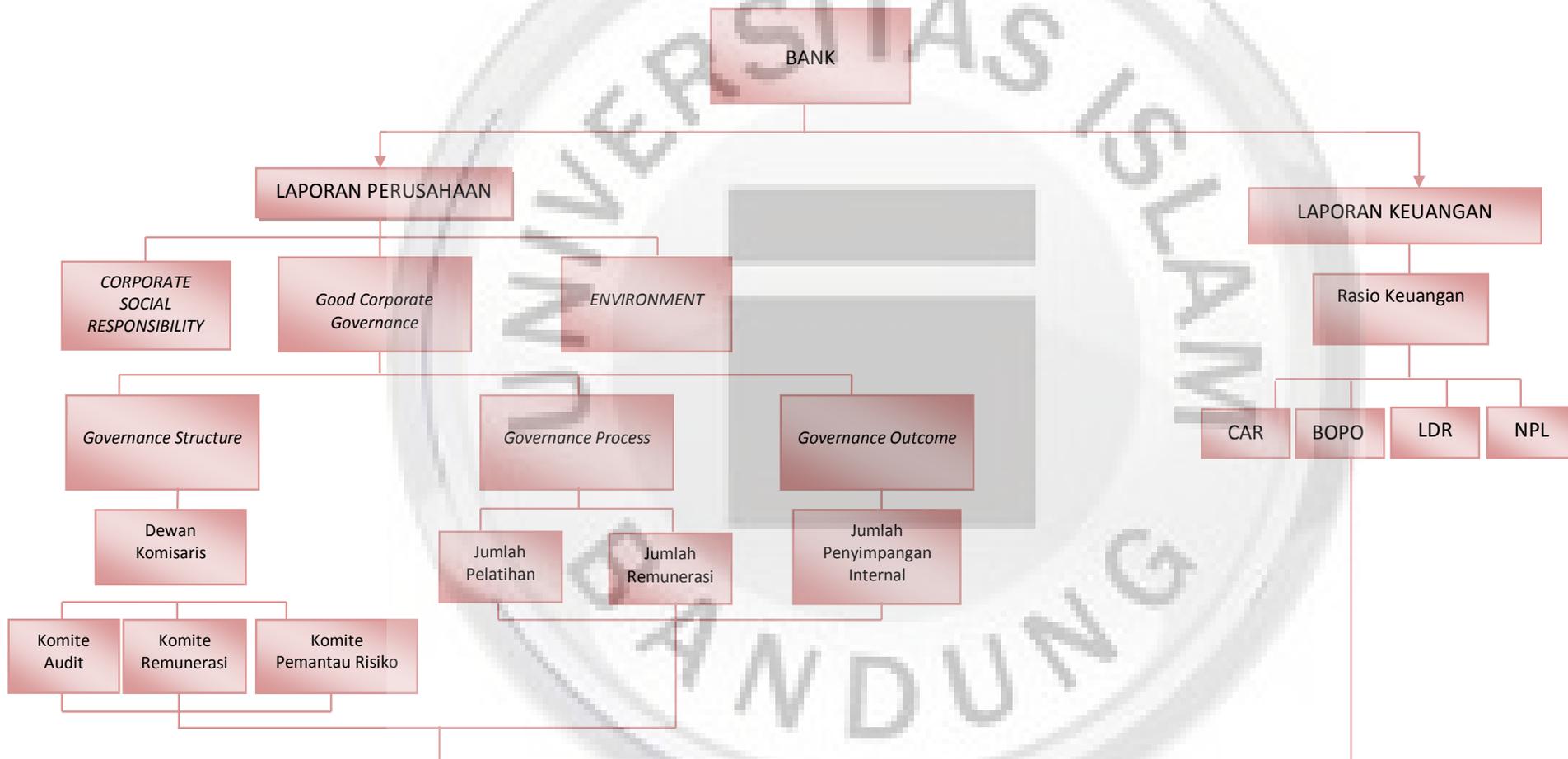
Dengan penjelasan di atas, dalam penelitian ini *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* sebagai variabel independen dan BOPO sebagai variabel dependen dari *operational risk*. Berdasarkan pada

landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka kerangka pemikiran yang dituangkan pada gambar berikut:



Gambar 1.2

Bagan Kerangka Pemikiran



1.5.2 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas masalah yang hendak diteliti. Perumusan hipotesis dilakukan berdasarkan pada literatur yang telah ada. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran serta penelitian-penelitian terdahulu maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

“Governance Structure, Governance Process, Dan Governance Outcome berpengaruh terhadap Operational Risk.

